

**TAHUN
2016 - 2021**



*"Infrastruktur yang Baik
untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat"*



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016 - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Pangeran Diponegoro No 10 Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang
MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- b. Bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja pada dasarnya untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tahun 1 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 176 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusun Rancangan Rencana Kerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 18 Februari 2019

Plt. Kepala Dinas



RISDIANSYAH, ST.MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19750527 200212 1 011

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak (sebagai laporan)
2. Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
4. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
5. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia-Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2016 – 2021, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government).

Dengan adanya Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Walaupun Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami, dan oleh sebab itu kami dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran - saran dan masukan dari semua pihak.



Demikian Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Sabak, Februari 2019

Plt. Kepala Dinas,



RISDIANSYAH, ST.MM

Pembina / IV.a

NIP. 19750527 200212 1 011



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	9
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2	Sumber Daya	22
2.2.1	Sumber Daya Manusia	22
2.2.2	Aset	24
2.2.3	Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran	25
2.2.4	Tantangan dan Peluang	28
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	31
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang...	31
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35



3.3	Telaahan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.....	38
3.4	Telaahan RTRW dan Kajian KLHS.....	39
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	44
4.1	Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	44
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	44
4.3	Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	47
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	53
5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	53
5.2	Program dan Kegiatan	54
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.....	66
BAB VII	PENUTUP.....	68



1.1 LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), diperlukan penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Dalam rangka tahap perencanaan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III Pasal 7 dan Bab V Pasal 15 dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian diimplementasikan melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta memperhatikan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra menjadi sangat penting.

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran).



Perencanaan Strategis ini disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran. Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Secara umum Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun kedepan;
2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Fungsional Umum dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan Good Governance, dengan memperhatikan:

(a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya
- (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang
- (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan instrument untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja. Disamping itu merupakan perencanaan program dan kegiatan dalam kurun lima tahun, sehingga dalam proses penyusunannya meperhatikan melalui beberapa tahapan.

1. Proses penjaringan visi dan misi organisasi.

Penjaringan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi mengetahui kearah mana organisasi dibawa agar tetap eksis, dan untuk menjabarkan visi organisasi diperlukan misi. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Menetapkan tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi, yang merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun dan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun;

3. Menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui program dan kegiatan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Timur Periode Tahun 2016-2021.



Selain itu Renstra juga merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan merupakan salah satu perangkat dalam pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam masa lima tahun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu organisasi dinas yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dalam kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsi sebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5875);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan pada latar belakang, bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 merupakan Rencana Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 tahun. Renstra ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana Visi dan Misi Bupati sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai



pedoman lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1. Mendapatkan dokumen renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang didalamnya menjabarkan program dan kegiatan serta target pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021.
2. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
3. Penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
4. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Renstra

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG,

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra, Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF,

Dalam bab ini akan menguraikan tentang rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selama 5 tahun dengan dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,

Dalam Bab ini menguraikan tentang indicator kinerja yang menjadi target pencapaian visi misi SKPD sekaligus terintegrasi dengan Visi Misi RPJMD Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP



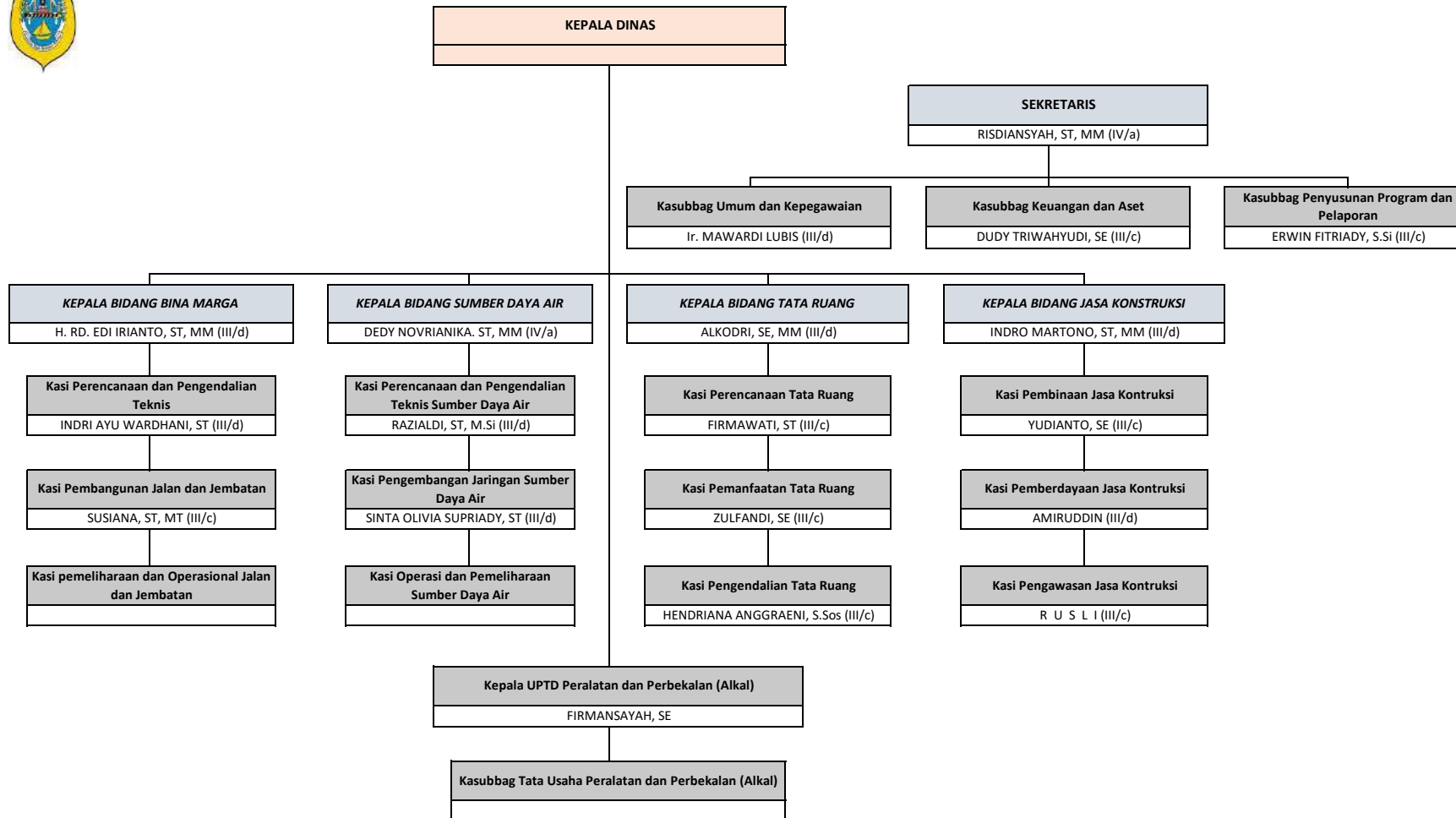
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, unit kerja Dinas Pekerjaan Umum tetap eksis, namun nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya tentang struktur organisasi diatur melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki struktur organisasi sebagai berikut :





STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Untuk Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten, dan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- b. Penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air
- d. Penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:



- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- f. Pengelolaan urusan umum.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan dinas
- b. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan dinas
- c. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan dinas
- d. Penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi
- f. Penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol
- h. Penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas



j. Penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan
- d. Penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan



perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jalan dan jembatan, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan
- b. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional pemanfaatan jalan dan jembatan
- d. Pelaksanaan rekomendasi izin penggunaan dan eksploitasi jalan Kabupaten
- e. Pelaksanaan rekomendasi izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas hambatan non lintas Kabupaten yang dibangun atas prakarsa Daerah.

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jalan dan Jembatan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan
- b. Penyiapan bahan survei kontur jalan dan jembatan
- c. Penyiapan bahan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- d. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan drainase/gorong-gorong/ jaringan jala (*box culvert*) pada ruas jalan Kabupaten
- e. Penyiapan bahan inspeksi kondisi jalan dan jembatan



- f. Penyiapan bahan penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- g. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan gedung workshop dan laboratorium kebinamargaan.

(2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pembangunan jalan dan jembatan
- b. Penyiapan bahan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong/*box culvert* pada ruas jalan Kabupaten
- c. Penyiapan bahan pembangunan gedung workshop dan laboratorium kebinamargaan.

(3) Seksi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan dan Operasional Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan operasional pemanfaatan jalan dan jembatan yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- b. Penyiapan bahan rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong/*box culvert* pada ruas jalan Kabupaten



- c. Penyiapan bahan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam kondisi tanggap darurat
- d. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop dan bahan laboratorium kebinamargaan
- e. Penyiapan bahan pengadaan peralatan dan perlengkapan serta pemeliharaan bengkel alat-alat berat.

4. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan dan pengendalian jaringan sumber daya air, dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis pengembangan jaringan sumber daya air
- b. Pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air
- c. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional jaringan sumber daya air.

(1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Sumber Daya Air Seksi Perencanaan dan Pengendalian Teknis Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan perencanaan turap/talud/bronjong
- b. Penyiapan bahan survei kemiringan lereng turap/talud/bronjong
- c. Penyiapan bahan survei pemetaan jaringan irigasi daerah rawa



- d. Penyiapan bahan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- e. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan jaringan irigasi;
- f. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan reservoir dan pintu air
- g. Penyiapan bahan perencanaan normalisasi saluran sungai.

(2) Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan jaringan sumber daya air yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pembangunan turap/talud/bronjong
- b. Penyiapan bahan pembangunan jaringan air bersih/air minum
- c. Penyiapan bahan pembangunan reservoir dan pintu air
- d. Penyiapan bahan normalisasi saluran sungai
- e. Penyiapan bahan pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- f. Penyiapan bahan peningkatan distribusi penyediaan air baku
- g. Penyiapan bahan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
- h. Penyiapan bahan peningkatan konversi air tanah
- i. Penyiapan bahan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

(3) Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan



pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan operasional jaringan sumber daya air yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
- b. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
- c. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan reservoir dan pintu air
- d. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
- e. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
- f. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air
- g. Penyiapan bahan rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
- h. Penyiapan bahan pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
- i. Penyiapan bahan rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
- j. Penyiapan bahan rehabilitasi kawasan lindung daerah tangkapan sungai dan danau
- k. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
- l. Penyiapan bahan rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

5. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan



dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan tata ruang
- b. Pelaksanaan pemanfaatan tata ruang
- c. Pelaksanaan pengendalian tata ruang.

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi Perencanaan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang meliputi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan revisi rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kawasan, rencana teknis ruang kawasan dan rencana tata bangunan dan lingkungan
- b. penyiapan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW, RDTRK, RTRK, dan RTBL
- c. penyiapan bahan sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang rencana tata ruang.

(2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang
- b. Penyiapan bahan rapat koordinasi tentang rencana pemanfaatan ruang
- c. Survey dan pemetaan pemanfaatan ruang.



(3) Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengendalian tata ruang yang meliputi:

- a. Penyiapan bahan pengawasan dan pencabutan izin pemanfaatan ruang yang menyalahi ketentuan
- b. Penyiapan bahan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
- d. Penyiapan bahan pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi
- b. Pelaksanaan pemberian informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat
- c. Pelaksanaan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi
- d. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi



- e. Pelaksanaan peningkatan kemampuan teknologi di bidang konstruksi
- f. Pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)
- g. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

(1) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi

Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi, pemberian informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja serta tata lingkungan setempat serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi.

(2) Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi serta peningkatan kemampuan teknologi di bidang konstruksi.

(3) Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,



evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (nonkecil dan kecil) serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peralatan dan Perbekalan (ALKAL)

UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Kabupaten.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 SUMBER DAYA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan struktur organisasi jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 68 orang Pegawai Negeri Sipil dan 92 orang Pegawai Honorar. Tingkat pendidikan dan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan formal

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Strata Dua (S2)	7 Orang	10,29
2	Strata Satu (S1)	29 Orang	42,65
3	Diploma (D3)	3 Orang	4,41
4	SLTA / Sederajat	27 Orang	39,71
5	SLTP / Sederajat	2 Orang	2,94
JUMLAH		68 Orang	100,00

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Pembina/ IV.a	3 Orang	4,41
2	Penata Tingkat I/ III.d	8 Orang	11,76
3	Penata/ III.c	9 Orang	13,24
4	Penata Muda Tingkat I/ III.b	9 Orang	13,24
5	Penata Muda/ III.a	13 Orang	19,12
6	Pengatur Tingkat I/ II.d	7 Orang	10,29
7	Pengatur / II.c	17 Orang	25
8	Pengatur Muda Tingkat I/ II.b	1 Orang	1,47
9	Pengatur Muda/ II.a	0 Orang	0
10	Juru Muda/ I.c	1 Orang	1,47
JUMLAH		68 Orang	100,00



Tabel 2.3

Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan struktural

NO	NAMA DIKLAT	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	ADUM/ ADUMLA/ PIM IV	ESELON II	1	Sudah
	SPAMA/ PIM III			Sudah
	SPAMEN/ PIM II			Belum
2.	ADUM/ ADUMLA/ PIM IV	ESELON III	5	1 Orang Sudah
	SPAMA/ PIM III			4 Orang Belum
3.	ADUM/ ADUMLA/ PIM IV	Eselon IV	22	6 Orang Sudah
				16 Orang Belum
4.	ADUM/ ADUMLA/ PIM IV	Non Eselon	38	1 Orang Sudah
				37 Orang Belum

2.2.2 Aset

Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditampilkan pada beberapa table di bawah ini :

Tabel 2.1.4

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	KLASIFIKASI INVENTARIS	JUMLAH (Unit)	KONDISI (%)		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Roda Empat	9	100,00	-	-
2	Kendaraan Roda Dua	20	90,00	10,00	-
3	Kendaraan Roda Enam	4	90,00	10,00	-
4	Peralatan Kantor	441	75,01	2,07	22,92
5	Alat Berat	13	100,00	-	-
6	Bangunan/SaranaPrasarana	3	100,00	-	-
TOTAL		490	92,50	3,68	3,82

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi inventaris kantor untuk peralatan kantor yang berjumlah 490 unit sebagian besar masih cukup baik



(92,50%), sementara alat berat berjumlah 13 unit selalu diadakan pemeliharaan/perawatan tiap tahunnya sehingga kondisi alat masih dalam keadaan cukup baik (100,00%), selain itu inventaris kantor berupa bangunan/sarana prasarana dengan jumlah 3 unit dalam kondisi masih sangat baik (100%), terakhir untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan dan kendaraan roda dua semua dalam keadaan baik (93,33%). Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan masih dalam kondisi baik, untuk mencapai target capaian dengan kondisi baik atau siap pakai perlu dilakukan pemeliharaan/perawatan setiap tahunnya guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

2.2.3 JENIS PELAYANAN DAN KELOMPOK SASARAN

Untuk melihat sejauhmana kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang baku yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator lainnya. Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Indikator Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang baik, seluas 30.912 Ha dari 44.100 Ha luas irigasi yang tersebar diseluruh kecamatan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau 70,1%
2. Indikator panjang jalan dalam kondisi baik, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai 466,63 KM panjang jalan dalam kondisi baik sampai tahun anggaran 2015 dari panjang keseluruhan yaitu sepanjang 993,88 KM, atau selaras dengan 46,95% jalan pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kondisi baik.

Lebih rinci penjelasan tentang pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel 2.3 sedangkan untuk pendanaan anggaran pelayanan Kantor Dinas Pekerjaan Umum telah dijelaskan sebelumnya dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini.



Tabel 2.3

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target			Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		SPM	IKU	IKD (%)	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi			95,00	95%					70,1					73,79%				
2	Terpenuhinya panjang jalan dalam kondisi baik			44,34	44,34%					46,95%					105,89%				

Keterangan :

SPM : Standar Pelayanan Minimal
IKU : Indikator Kinerja Utama

2.2.4 TANTANGAN DAN PELUANG

Seiring dengan dinamika dalam pelaksanaan pembangunan, perkembangan daerah, wilayah sekitar yang mau tidak mau ikut memberi dampak terhadap Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta makin tingginya tuntutan masyarakat akan sarana dan prasarana pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendorong aspek perekonomian, lingkungan dan sosial budaya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kekuatan-kekuatan antara lain :

1. Adanya struktur organisasi yang jelas disertai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Adanya struktur organisasi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)
3. Terintegrasinya penyelenggaraan pembangunan dibidang pekerjaan umum dengan dibentuknya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Adanya lembaga-lembaga masyarakat yang mendukung tupoksi.

Disamping adanya kekuatan-kekuatan, tentunya juga ada beberapa kelemahan-kelemahan antara lain :

1. Kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten, baik dari segi kemampuan teknis maupun pemahaman terhadap paradig pelayanan publik
2. Terbatasnya sumber dana Pemerintah Daerah untuk mendukung seluruh Program/kegiatan
3. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan dibandingkan dengan tuntutan kualitas pelayanan prima



4. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah yang berdampak pada belum tercapainya sinergisitas upaya pembangunan di daerah

Beberapa tantangan sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penataan lingkungan khususnya kawasan perkotaan sesuai dengan master plan yang ditetapkan.
2. Adanya resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti tanggul kritis, kekeringan, abrasi pantai dan pencemaran air baku.
3. Perubahan iklim global (musim kemarau) dan meningkatnya degradasi lingkungan seperti banjir, abrasi air laut dan lain-lain.
4. Munculnya daerah rawan banjir akibat saluran sungai yang tidak dapat menampung debit banjir pada periode tertentu.
5. Masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur dan kondisi tanah dasar yang labil.
6. Semakin tingginya volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan/tonase.

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Adanya Misi Bupati ke-1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas
2. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan.
3. Adanya bantuan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan APBN.



4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, informasi maupun kritik guna tercapainya pelaksanaan kegiatan yang baik.
5. Ketersediaan prasarana irigasi disertai Sumber Daya Air dan Sungai.

PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1. Otonomi Daerah;
2. Kebutuhan hasil pembangunan Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sangat tinggi;
3. Komitmen yang kuat dari Pemerintah dalam Pembangunan Sektor Infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Tersedia stakeholders yang turut serta mendukung pembangunan sektor Infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Dilanjutkannya pembangunan pelabuhan Ujung Jabung dan Pembangunan Pelabuhan Samudra yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Adanya peningkatan status jalan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari jalan Propinsi menjadi jalan nasional;
7. Adanya pengaruh globalisasi.



3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi diantaranya:

1. Bidang Bina Marga.

- a. Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat.
- b. Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya.
- c. Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.
- d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota belum berjalan secara sinergi terutama dengan sentra aktivitas perekonomian daerah, seperti integasi jalan pertanian dengan jalan kabupaten dalam mengangkut hasil pertanian ke pusat pengolahan dan industri hilir dan sentra-sentra pemasaran.



2. Bidang Sumber Daya Air

- a. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan/atau pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum berjalan optimal.
- b. Belum terbentuknya komisi irigasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang pengelolaan jaringan irigasi baik untuk perkebunan, pertanian maupun jalur bisnis.
- c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Belum tertatanya pengelolaan dalam hal pemanfaatan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder yang berada dalam satu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Belum maksimalnya pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- f. Belum optimalnya dalam pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten
- g. Belum optimalnya pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.

3. Bidang Tata Ruang

- a. Belum memadainya pembinaan penataan Ruang baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kepada masyarakat, terlihat pada intensitas kegiatan pembinaan selama ini masih kurang
- b. Pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang seperti peninjauan kembali RTRW Kabupaten yang menjadi dasar untuk pembuatan



turunan penataan ruang dan dasar pemberian izin (IMB, izin prinsip dan izin lokasi) masih lambat, sehingga mengganggu proses pelayanan perijinan kepada masyarakat.

- c. Masih lemahnya pengawasan penataan ruang, sehingga banyak terjadi penyimpangan seperti bangunan tanpa IMB, terjadi perubahan pemanfaatan bangunan.
- d. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pelanggaran pemanfaatan ruang.
- e. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang.

4. Bidang Jasa Konstruksi

- a. Masih kurangnya pembinaan terhadap desain bangunan yang pro lingkungan.
- b. Masih adanya Badan Usaha Jasa Konstruksi tenaga teknis yang merangkap tenaga administrasi dan sebagai direktur.
- c. Kurang selektifnya pemberian ijin jasa konstruksi sehingga usaha jasa konstruksi masih memerlukan pembinaan.

Secara rinci identifikasi permasalahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai tertera dalam tabel 3.1 dibawah ini.



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Sumberdaya Manusia	Tidak terpenuhi	IKK	-	Kebijakan penempatan pegawai oleh institusi berwenang	Keterbatasan personil teknik mempengaruhi kualitas kerja.
Sumberdaya Anggaran	Belum terpenuhi	IKK	Keterbatasan anggaran	Kebijakan efisiensi anggaran	Tidak dapat menampung seluruh proposal pembangunan Infrastruktur
Sarana Prasarana Kerja	Jumlah Kendaraan Operasional terbatas	IKK	Keterbatasan anggaran	Kebijakan efisiensi anggaran	Sulit melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan
Prilaku Organisasi	Budaya kerja yang berorientasi hasil belum melekat di setiap personil	IKK	Pembagian tugas yang belum merata disetiap personil dan kompetensi yang dimiliki personil	-	Pelayanan yang belum maksimal
Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Mantap 74,43%	IKD	Keterbatasan anggaran dibanding jumlah panjang jalan dan kondisi jalan yang ada.	Kondisi geografis yang cukup berat shg memerlukan perlakuan yang sangat cermat dan teliti	Kondisi jalan yang rusak, juga adalah jalan nasional yang dalam pemeliharaan merupakan kewenangan APBN.
	Pembangunan Jembatan Permanen	IKD	Keterbatasan pembiayaan daerah untuk membangun jembatan	Kondisi geografis yang sebagian besar adalah sungai	Jumlah personil teknis yang terbatas
Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pengelolaan jaringan irigasi yang belum tertata dengan baik	IKD	Keterbatasan personil teknis untuk mengawasi jaringan irigasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Belum terbentuknya komisi irigasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mengatur tentang pengelolaan jaringan irigasi baik untuk perkebunan, pertanian maupun jalur bisnis	Kemampuan personil teknis yang terbatas dalam hal merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pengelolaan jaringan irigasi



Tata Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap tata ruang	IKD	lemahnya pengawasan penataan ruang	rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang	Belum memadainya pembinaan penataan Ruang oleh aparat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun kepada masyarakat
Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan menjadi 12,41%	IKD	Kompetensi sumberdaya manusia	Globalisasi pertumbuhan ekonomi berbasis investasi	Perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara bersinergi dan terintegrasi seluruh stakeholders di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya harus mengacu kepada Visi Misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. Visi misi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021 merupakan representasi dari janji politik Kepala Daerah yang terpilih untuk direalisasikan selama 5 tahun.

Adapun Visi RPJMD 2016-2021 adalah : "Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat" dengan akronim "MERAKYAT". Dan untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan kedalam 5 misi strategis yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan peluang investasi dibidang Industri dan Kepariwisata.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, Kesetaraan Gender dan penerapan IPTEK.



4. Mewujudkan masyarakat yang agamis, dan berbudaya serta keamanan daerah yang kondusif;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik, bersih, transparan dan demokratis

Dari kelima misi tersebut, yang menjadi fokus interpretasi pencapaiannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah pada Misi kesatu. Penjabaran review misi daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Review Telaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Merakyat)				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
MISI 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas				
	<p>PROGRAM :</p> <p>a. Menuntaskan perbaikan dan pembangunan jalan mulai dari jalan desa, desa ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten dan ke Provinsi.</p> <p>b. Memperluas jangkauan jaringan aliran listrik dan air bersih dengan</p>	<p>1. Jumlah personil teknis yang terbatas menjadikan sulit melaksanakan pekerjaan jalan dan jembatan dengan cepat serta miskoordinasi antara pemerintah Kabupaten dengan pemerintah desa;</p> <p>2. Belum tersedia lembaga khusus</p>	<p>➤ Keterbatasan dana untuk mendukung kegiatan perencanaan berupa kajian, studi, pengukuran;</p> <p>➤ Keterbatasan kompetensi sumberdaya yang dimiliki;</p> <p>➤ Keterbatasan pembiayaan membangun jaringan air</p>	<p>- Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi fokus pengembangan ekonomi Provinsi Jambi;</p> <p>- Daerah memiliki sumber air untuk diolah menjadi Air Bersih;</p> <p>- Program Air</p>



	<p>mengoptimalkan Anggaran daerah secara merata dan berkeadilan di setiap desa.</p> <p>c. Menyelesaikan pembangunan tanggul terutama di kawasan pertanian masyarakat.</p> <p>d. Mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan untuk kepentingan mobilitas perekonomian masyarakat.</p> <p>e. Mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi.</p>	<p>yang menangani pelayanan air bersih dan keterbatasan personil di SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>3. Keterbatasan Data dan informasi tentang penataan jaringan irigasi;</p> <p>4. Masterplan baik yang menyangkut perencanaan infrastruktur, perencanaan ekonomi dan perencanaan;</p> <p>5. Sinergisitas pembangunan yang belum terkoodinasi dengan baik.</p>	<p>bersih;</p> <p>➤ Kondisi geografis daerah yang sebagian besar daerah rawa gambut pasang surut;</p> <p>➤ Kondisi geografis daerah yang sebagian besar daerah rawa gambut pasang surut;</p>	<p>Bersih merupakan program nasional;</p> <p>- Komitmen kepala daerah melalui program 1 kecamatan 1 excavator;</p> <p>- Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lokus pengembangan ekonomi Provinsi Jambi;</p>
--	--	---	--	---



3.3 TELAAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAMBI

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sesungguhnya telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi karena RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2016-2021 telah diverifikasi dan dievaluasi oleh Pemerintah provinsi Jambi melalui BAPPEDA Provinsi Jambi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi. Sinergisitas ini tidak dapat di tuangkan dalam table 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Berdasarkan Sasaran RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi	Permasalahan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.			NIHIL	



3.4 TELAAHAN RTRW DAN KAJIAN KLHS

Berikut identifikasi permasalahan SKPD di dalam mewujudkan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan RTRW beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas PU	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I.	<p>Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer K2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Pelabi – Ruas Simpang Lagan; dan 2. Ruas Muara Sabak – Ruas Simpang Suak Kandis. 	<p>a. Kurangnya koordinasi dengan APBN</p>	<p>➤ Anggaran terbatas sehingga anggaran yang tersedia tidak sebanding dengan penanganan jalan yang rusak</p>	<p>❖ Komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan secara prioritas</p>
II.	<p>Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Lokal Primer meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Muara Sabak – Ruas Bandar Jaya; 2. Ruas Mendara Ulu – Ruas Catur Cahaya – Bandar Jaya; 3. Ruas Simpang Desa – Ruas Simpang Datuk; 	<p>a. Personil pengawasan yang belum berjalan efektif;</p> <p>b. Pembiayaan pembangunan yang tersedia masih terbatas untuk memenuhi rencana tersebut</p>	<p>➤ Jumlah Personil terbatas;</p> <p>➤ Sumber Pendapatan Daerah masih kecil.</p>	<p>❖ Komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan secara prioritas</p>



	<p>4. Ruas Simpang Datuk – Ruas Sungai Jambat;</p> <p>5. Ruas Nipah Panjang – Ruas Sungai Lokan;</p> <p>6. Ruas Teluk Majelis – Alang-alang – Simburnaik – Pemusiran – Nipah Panjang;</p> <p>7. Ruas Muara Sabak – Ruas Alang-alang;</p> <p>8. Ruas Geragai – Legan Tengah – Ruas Teluk Majelis;</p> <p>9. Ruas Muara Sabak Barat – Pandan Jaya – Mendahara;</p> <p>10. Ruas Teluk Dawan – Rantau Indah – Koto Kandis;</p> <p>11. Ruas Rantau Karya – Catur Rahayu – Koto Kandis;</p> <p>12. Ruas Jembatan Muara Sabak – Kota Muara Sabak Timur; dan</p>			
--	--	--	--	--



	13. Ruas Muara Sabak Timur – Seberang Teluk Majelis.			
III.	<p>Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Strategis Nasional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruas Muara Sabak – Ruas Pelabi, dan 2. Ruas Pelabi – Ruas Talang Duku; 	<ol style="list-style-type: none"> a. Personil Pengawasan yang belum berjalan efektif; b. Pembiayaan pembangunan yang tersedia masih terbatas untuk memenuhi rencana tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah personil terbatas; ➤ Sumber pendapatan daerah masih kecil 	❖Komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan secara prioritas
IV.	<p>Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sumber Sungai Batang Hari di Desa Puding Kecamatan Dendang yang melayani Kecamatan Dendang, Kecamatan Geragai, Kecamatan Muara Sabak Barat, dan Kecamatan Kuala Jambi; 2. Pengembangan Sumber Sungai Batang Hari di Simpang Kecamatan Rantau Rasau melayani Kecamatan 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembiayaan pembangunan yang tersedia masih terbatas untuk memenuhi rencana tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah personil terbatas; ➤ Sumber pendapatan daerah masih kecil 	❖Komitmen daerah untuk melaksanakan pembangunan secara prioritas



	Rantaurasau, Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Muara Sabak Timur; dan			
	3. Pembangunan Tanggul di Kecamatan Sadu, Kecamatan Nipah Panjang, Kecamatan Mendahara Ilir, Kecamatan Kuala Jambi, dan Kecamatan Muara Sabak Timur.			

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari indentifikasi permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi atas pelayanan SKPD baik di tinjau dari dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah Renstra, implikasi RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD. Dan berdasarkan pengukuran melalui metoda penentuan isu-siu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Berikut tergambar isu strategis di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

1. Kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan handal belum terpenuhi dengan baik;
2. Masih ada beberapa desa yang mengalami keterisolasian terhadap akses jalan;
3. Pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung kedaulatan pangan dalam rangka kemandirian ekonomi belum optimal;
4. Pengawasan penataan ruang kurang maksimal, sehingga terjadi penyimpangan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan,



terjadi perubahan pemanfaatan bangunan, sehingga berdampak negatif terhadap kepentingan umum;

5. Belum tersedianya Peraturan Daerah tentang sanksi administratif, perdata dan pidana untuk pelanggaran pemanfaatan ruang;
6. Penerapan konsep green consruction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan dalam rangka merespon pemanasan global.



4.1 VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah **“INFRASTRUKTUR YANG BAIK UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”**.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan pembangunan infrasruktur Sumber Daya Air untuk mendukung kedaulatan pangan dalam rangka kemandirian ekonomi.
3. Meningkatkan pemanfaatan, pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis daerah secara terpadu, selaras, berlanjut, berdayaguna dan berhasil guna.
4. Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi kepada penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

5.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pengimplementasiannya belum dapat dilaksanakan karena masih sulit diukur, untuk memudahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang



melaksanakan visi misi tersebut harus diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang lebih bersifat operasional dan aplikatif. Untuk itu, yang menjadi tujuan dan sasaran visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebagai berikut :

Tujuan :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap
2. Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan
3. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota
4. Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa yang profesional dan berintegritas
5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar
2. Menciptakan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten
4. Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa sesuai profesi di sektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global
5. Meningkatnya pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan

Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1



Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016 - 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	32.26%	40.86%	49.46%	61.29%	73.12%	84.94%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	30%	32%	34%	36%	38%	40%
3	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	Persentase Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan Kompetensi Penyedia Barang dan Jasa sesuai profesi di sektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	-	80%	80%	85%	90%	100%
			Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	-	-	-	64%	82%	100%
5	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM	-	-	-	76	82	88
			Nilai AKIP	-	-	-	65	68	70
			Laporan Keuangan	-	-	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun berdasarkan 5 tujuan dan 5 sasaran dari visi misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar

Untuk mencapai sasaran 1 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas jalan sesuai pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum
2. Aksesibilitas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi diwilayah yang lain
3. Melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan dan jembatan penghubung antar Desa dan Kecamatan melalui kontraktual dan swakelola
4. Membentuk lembaga/perwakilan di kecamatan yang bertugas memelihara jalan mengalami kerusakan dan meningkatkan jalan dan jembatan prioritas
5. Menyiapkan anggaran khusus/rutin untuk memelihara jalan dan jembatan yang bersifat darurat

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan akses antara pusat-pusat permukiman dengan pusat perekonomian dan produksi serta meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi
2. Pengembangan sistem prasarana transportasi terpadu, prasarana transportasi yang akan dikembangkan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan kecamatan dan desa-desa
3. Meningkatkan akses ke desa/wilayah potensial dan sentra produksi yang masih terisolir dan meningkatkan akses ke pasar
4. Menginventarisir kondisi jalan dan jembatan penghubung antar Desa dan Kecamatan
5. Membentuk UPTD Alkal di 4 (empat) Zona dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur
6. Menyiapkan anggaran Tanggap darurat yang dilaksanakan secara swakelola



- Sasaran 2 : Menciptakan sistem pengelolaan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan.
- Untuk mencapai sasaran 2 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah :
1. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat
 2. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
1. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tidak menggunakan alat berat tetapi manual (tenaga manusia)
 2. Mengupayakan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangan pengelolaannya
- Sasaran 3 : Pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten
- Untuk mencapai sasaran 3 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah :
1. Standar operasional prosedur untuk rekomendasi pelayanan teknis pemanfaatan ruang
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
2. Menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan teknis penataan ruang
- Sasaran 4 : Meningkatkan kompetensi penyedia barang dan jasa sesuai profesi disektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global.
- Untuk mencapai sasaran 4 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah :
1. Penyiapan kompetensi penyedia barang dan jasa
 2. Bimbingan teknis bagi penyedia barang dan jasa
 3. Pendidikan dan pelatihan bagi penyedia barang dan jasa
- Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :
1. Menyusun agenda kerja untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan Diklat bagi penyedia barang dan jasa
 2. Menghitung jumlah personil dan pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis dan Diklat bagi penyedia barang dan jasa



Sasaran 5 : Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

Untuk mencapai sasaran 4 diatas, **strategi** yang dilakukan adalah strategi yang dilakukan adalah :

1. Penyiapan Survei IKM
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sedangkan **kebijakan** yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Skor IKM
2. Meningkatkan capaian nilai AKIP dan kualitas laporan keuangan

Lebih rinci strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terintegrasi dengan visi misi daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3



Tabel 4.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

VISI : INFRASTRUKTUR YANG BAIK UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MISI I : Meningkatkan Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar	Meningkatkan kualitas jalan sesuai pengembangan ekonomi wilayah serta menjamin kesejahteraan masyarakat umum
		Aksesibilitas jalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur harus terus dijamin dan ditingkatkan, tidak saja ke pusat ibukota Propinsi, tapi ke beberapa pusat perekonomian dan administrasi di wilayah yang lain;
		Melaksanakan pemeliharaan terhadap jalan dan jembatan penghubung antar Desa dan Kecamatan melalui kontraktual dan swakelola
		Membentuk lembaga/ perwakilan di kecamatan yang bertugas memelihara jalan mengalami kerusakan dan meningkatkan jalan dan jembatan prioritas
		Menyiapkan anggaran khusus/ rutin untuk memelihara jalan dan jembatan yang bersifat darurat

MISI II : Meningkatkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung kedaulatan pangan dalam rangka kemandirian ekonomi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat
		Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala

MISI III : Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang wilayah dan penataan ruang kawasan strategis daerah secara terpadu, selaras, berlanjutan, berdayaguna dan berhasil guna.		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	Standar operasional prosedur untuk rekomendasi pelayanan teknis pemanfaatan ruang

MISI IV : Meningkatkan pembinaan jasa konstruksi kepada penyedia barang dan jasa yang berkualitas dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan Kompetensi Penyedia Barang dan Jasa sesuai profesi di sektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global	Penyiapan kompetensi penyedia barang dan jasa
		Bimbingan teknis bagi penyedia barang dan jasa
		Pendidikan dan pelatihan bagi penyedia barang dan jasa

MISI V : Meningkatkan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Penyiapan Survey IKM
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan UU No 25 tahun 2004, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Program merupakan penjabaran dari strategis dan kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi, misi dan tujuan pelayanan. Sedangkan indikator kinerja berarti ukuran kemampuan dalam mengubah suatu kondisi yang tercermin dari perbaikan aspek sosial budaya, ekonomi, fisik dan pemerintahan.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan lancar	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	(jumlah desa/kel yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi mantap/jumlah desa/kel) x 100%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang kedaulatan pangan	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Cakupan Luas Sawah yang terairi oleh jaringan irigasi	(Luas Sawah yang terairioleh jaringan irigasi yang dibangun/dipelihara dibagi luas Sawah keseluruhan) x 100%
3	Meningkatnya pengendalian penataan ruang wilayah dan kawasan strategis sesuai RTRW	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	(Realisasi RTRW/Rencana Peruntukan) x 100%

5.2 PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk rencana program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
11. Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah
12. Penyediaan Logistik Pameran
13. Penataan File Kepegawaian.

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan Rutin Berkala Aset Pemda
3. Pembangunan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeulair
5. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor
9. Pengadaan Alat-alat berat

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;

D. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

1. Pengembangan SDM

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



F. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
3. Evaluasi Rencana Kerja

G. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1. Perencanaan Jalan
2. Pembangunan Jalan
3. Perencanaan Jembatan
4. Pembangunan Jembatan
5. Pengawasan Jalan
6. Pengawasan Jembatan

G. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG

1. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong
2. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong
3. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong – gorong

H. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1. Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat
2. Operasional UPTD - ALKAL

I. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA.

1. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
2. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun.



- J. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG
 - 1. Peninjauan kembali RTRW Kabupaten
 - 2. Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tanjung Jabung Timur
 - 3. Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur
 - 4. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perumahan (RP3KP)
 - 5. Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
 - 6. Finalisasi Materi Teknis dan Draf Ranperda RDTR Perkotaan Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur
 - 7. Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
 - 8. Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur
 - 9. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten
- K. PROGRAM PEMANFAATAN TATA RUANG
 - 1. Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- L. PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG
 - 1. Sosialisasi Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - 2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
- M. PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI
 - 1. Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi
 - 2. Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Manajemen Mutu (SMM)
 - 3. Bintek dan Pelatihan ke PU an
 - 4. Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 5. Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi
 - 6. Workshop Sistem Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3)



N. PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

1. Bintek dan Pelatihan Jalan dan Jembatan
2. Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi
3. Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil
4. Sosialisasi Administrasi Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
5. Bintek Perhitungan Pelaporan dan Schedule Kurva Kegiatan Jasa Konstruksi

Lebih lengkap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel 5.1



RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Keterangan
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	NA	100 %	1,871,636,892.09	100 %	2,584,032,896.22	100 %	2,585,132,311.55							100 %	7,040,802,099.86	Bagian Sekretaris Dinas PUPR		
				Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran	100 %					100 %	2,242,255,400.00	100 %	2,069,825,900.00	100 %	2,101,701,000.00	100 %	6,413,782,300.00					
			1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa pos dan keperluan surat menyurat	NA	12 Bln	13,500,000.00	12 Bln	13,500,000.00	12 Bln	13,500,000.00								36 Bln		40,500,000.00	
				Jumlah Materai	NA					2,690 Bh	12,200,000.00	2,690 Bh	12,200,000.00	2,690 Bh	12,200,000.00	8,070 Bln	36,600,000.00					
			2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	NA	12 Bln	150,006,892.09	12 Bln	149,932,896.22	12 Bln	130,132,311.55								36 Bln		430,072,099.86	
				Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Bln					12 Bln	42,000,000.00	12 Bln	42,000,000.00	12 Bln	42,000,000.00	60 Bln	126,000,000.00					
			3 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	NA	12 Bln	900,000,000.00	12 Bln	900,000,000.00	12 Bln	900,000,000.00								36 Bln		2,700,000,000.00	
				Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	36 Bln					12 Bln	882,000,000.00	12 Bln	882,000,000.00	12 Bln	885,000,000.00	60 Bln	2,649,000,000.00					
			4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Pengelolaan Kebersihan Kantor	NA	12 Bln	19,000,000.00	12 Bln	19,000,000.00	12 Bln	20,000,000.00								36 Bln		58,000,000.00	
				Pengadaan Peralatan Kebersihan Kantor	NA					4 Kali	12,000,000.00	4 Kali	12,000,000.00	4 Kali	12,000,000.00	12 kali	36,000,000.00					
			5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	NA	12 Bln	70,000,000.00	12 Bln	70,000,000.00	12 Bln	90,000,000.00								36 Bln		230,000,000.00	
				Pengadaan Alat Tulis Kantor	36 Bln					12 Bln	74,000,000.00	12 Bln	74,000,000.00	12 Bln	74,000,000.00	60 Bln	222,000,000.00					
			6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	NA	12 Bln	60,000,000.00	12 Bln	60,000,000.00	12 Bln	60,000,000.00								36 Bln		180,000,000.00	
				Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	NA					5 Jenis	45,000,000.00	5 Jenis	45,000,000.00	5 Jenis	45,000,000.00	15 Jenis	135,000,000.00					
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	NA	12 Bln	13,130,000.00	12 Bln	15,100,000.00	12 Bln	15,000,000.00								36 Bln	43,230,000.00					
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	NA					15 Bh	11,000,000.00	15 Bh	11,000,000.00	15 Bh	11,000,000.00	45 Bh	33,000,000.00								
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	NA	12 Bln	25,000,000.00	12 Bln	25,500,000.00	12 Bln	25,500,000.00								36 Bln	76,000,000.00					
	Pembayaran Tagihan Surat Kabar	36 Bln					12 Bln	5,000,000.00	12 Bln	5,000,000.00	12 Bln	5,000,000.00	60 Bln	15,000,000.00								
9 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	NA	12 Bln	30,000,000.00	12 Bln	30,000,000.00	12 Bln	30,000,000.00								36 Bln	90,000,000.00					
	Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat	36 Bln					12 Bln	30,000,000.00	12 Bln	30,000,000.00	12 Bln	30,000,000.00	60 Bln	90,000,000.00								
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi ke luar daerah	NA	12 Bln	180,000,000.00	12 Bln	400,000,000.00	12 Bln	400,000,000.00								36 Bln	980,000,000.00					
	Pembayaran Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	36 Bln					12 Bln	280,000,000.00	12 Bln	280,000,000.00	12 Bln	330,000,000.00	60 Bln	890,000,000.00								
11 Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah	Tercapainya hasil dan laporan koordinasi ke dalam daerah	NA	12 Bln	90,000,000.00	12 Bln	90,000,000.00	12 Bln	90,000,000.00								36 Bln	270,000,000.00					
	Pembayaran Monitoring dan Evaluasi	36 Bln					12 Bln	90,000,000.00	12 Bln	90,000,000.00	12 Bln	90,000,000.00	60 Bln	270,000,000.00								
12 Penyediaan Logistik Pameran	Pengadaan Logistik Pameran			-		-			1 Kali	20,000,000.00	1 Kali	20,000,000.00	1 Kali	20,000,000.00	3 kali	60,000,000.00						
13 Penataan file kepegawaian	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	NA	11 Bln	321,000,000.00	11 Bln	811,000,000.00	11 Bln	811,000,000.00								33 Bln	1,943,000,000.00					
	Pembayaran Jasa Kerja PHTT	33 Bln					11 Bln	739,055,400.00	11 Bln	566,625,900.00	11 Bln	545,501,000.00	55 Bln	1,851,182,300.00								

Skor IKM	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	NA	100 %	15,923,332,000.00	100 %	7,585,229,000.00	100 %	2,796,410,000.00						100 %	26,304,971,000.00	Bagian Sekretaris 1 Dinas PUPR	
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %						100 %	6,450,152,313.00	100 %	5,954,135,600.00	100 %	6,045,829,000.00	100 %	18,450,116,913.00		
	14	Pemeliharaan Rutin Berkala Aset Pemda	NA	12 Bln	3,000,000,000.00	12 Bln	2,236,000,000.00	12 Bln	1,968,910,000.00						36 Bln	7,204,910,000.00		
		Jumlah Aset Pemda yang dipelihara	NA							20 Paket	1,586,500,000.00	20 Paket	1,586,500,000.00	20 Paket	1,677,500,000.00	60 Paket	4,850,500,000.00	
	15	Pembangunan Gedung Kantor	NA	1 Unit	3,750,000,000.00	1 Unit	180,000,000.00								2 Unit	3,930,000,000.00		
		Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	2 Unit							1 Unit	200,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	1 Unit	100,000,000.00	5 Unit	400,000,000.00	
	16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	NA	12 Bln	209,700,000.00	12 Bln	110,000,000.00	12 Bln	187,100,000.00						36 Bln	506,800,000.00		
		Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	NA							25 Unit	96,500,000.00	25 Unit	96,500,000.00	10 Unit	96,500,000.00	60 Unit	289,500,000.00	
	17	Pengadaan Mebeulair	NA	12 Bln	150,000,000.00										12 Bln	150,000,000.00		
		Jumlah Pengadaan Mebeulair	NA							30 Unit	22,500,000.00	30 Unit	22,500,000.00	30 Unit	22,500,000.00	90 Unit	67,500,000.00	
	18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	22 Unit	22 Unit	326,610,000.00	22 Unit	374,000,000.00	22 Unit	350,300,000.00						66 Unit	1,050,910,000.00		
		Jumlah Kendaraan yang terpelihara	66 Unit							22 Unit	340,000,000.00	24 Unit	140,000,000.00	27 Unit	140,000,000.00	139 Unit	620,000,000.00	
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	NA	1 Unit	2,032,000,000.00										1 Unit	2,032,000,000.00		
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Unit							3 Unit	240,652,313.00	2 Unit	44,635,600.00	2 Unit	45,329,000.00	8 Unit	330,616,913.00	
	20	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	NA	12 Bln	22,800,000.00	12 Bln	30,000,000.00	12 Bln	35,500,000.00						36 Bln	88,300,000.00		
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	NA							37 Unit	30,000,000.00	37 Unit	30,000,000.00	15 Unit	30,000,000.00	89 Unit	90,000,000.00	
	21	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	NA	2 Unit	2,500,000,000.00	1 Unit	285,000,000.00								3 Unit	2,785,000,000.00		
		Jumlah Gedung/Kantor yang direhab	3 Unit							4 Unit	520,000,000.00	4 Unit	520,000,000.00	2 Unit	520,000,000.00	13 Unit	1,560,000,000.00	
	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	NA	1 Unit	422,222,000.00										1 Unit	422,222,000.00		
	23	Pencanaan Pembangunan Gedung Kantor	NA	1 Paket	360,000,000.00										1 Paket	360,000,000.00		
		Jumlah Paket Pencanaan Gedung kantor yang dilaksanakan	1 Paket							1 Paket	14,000,000.00	1 Paket	14,000,000.00	1 Paket	14,000,000.00	4 Paket	42,000,000.00	
	24	Pengadaan Alat-Alat Berat	NA	3 Unit	3,150,000,000.00	4 Unit	4,370,229,000.00		254,600,000.00						7 Unit	7,774,829,000.00		
		Jumlah Pengadaan Alat-alat Berat	7 Unit							2 Unit	3,400,000,000.00	2 Unit	3,400,000,000.00	2 Unit	3,400,000,000.00	13 Unit	10,200,000,000.00	
	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	52,560,000.00	100 %	57,000,000.00	100 %	57,000,000.00							166,560,000.00		
		Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	NA	167 Stel	52,560,000.00	167 Stel	57,000,000.00	167 Stel	57,000,000.00						501 Stel	166,560,000.00		
		Jumlah Pakaian Dinas ASN dan PHTT	501 Stel							167 Stel	71,037,750.00	167 Stel	65,574,950.00	167 Stel	66,584,900.00	835 Stel	203,197,600.00	
	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	236,469,000.00	100 %	140,000,000.00	100 %	229,204,000.00							605,673,000.00		
		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %							100 %	154,640,000.00	100 %	142,748,184.00	100 %	144,946,600.00	100 %	442,334,784.00	
	26	Pengembangan SDM	NA	12 Bln	236,469,000.00	12 Bln	140,000,000.00	12 Bln	229,204,000.00						36 Bln	605,673,000.00		
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat								25 ASN	154,640,000.00	25 ASN	142,748,184.00	25 ASN	144,946,600.00	75 ASN	442,334,784.00	
	5	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	CC	B	208,361,000.00	B	7,000,000.00	B	14,000,000.00						B	229,361,000.00		

		Nilai AKIP	Persepsi	NA						100 %	29,768,200.00	100 %	27,479,100.00	100 %	27,902,300.00	100 %	85,149,600.00	Bagian Sekretaris Dinas PUPR					
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD	NA	5 Dok	208,361,000.00	5 Dok	7,000,000.00	5 Dok	14,000,000.00					15 Dok	229,361,000.00							
			Jumlah Laporan Keuangan, Perjanjian Kinerja, LAKIP, LKPJ dan LPPD	15 Dok							5 Dok	29,768,200.00	5 Dok	27,479,100.00	5 Dok	27,902,300.00	25 Dok	85,149,600.00					
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	100 %	196,160,000.00	100 %	8,000,000.00	100 %	20,000,000.00						100 %	224,160,000.00						
Laporan Keuangan	6	Persepsi	NA							93 %	19,330,000.00	93 %	17,843,500.00	93 %	18,118,500.00	93 %	55,292,000.00	Bagian Sekretaris Dinas PUPR					
			Persepsi Keseluruhan Pembangunan	NA																			
		Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	NA	2 Dok	24,810,000.00										2 Dok	24,810,000.00							
		Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)	NA	2 Dok	111,350,000.00	2 Dok	8,000,000.00	2 Dok	20,000,000.00						6 Dok	139,350,000.00							
		30	Evaluasi Rencana Kerja	NA	1 Dok	60,000,000.00								1 Dok	60,000,000.00								
Meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan kondisi mantap	Meningkatkan Kualitas Jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap dan dapat dilalui kendaraan dengan kondisi lancar	Persepsi terhubungnya desa/keurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	7	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persepsi Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	74.43 %	76.75 %	208,751,551,000.00	78.6 %	122,049,897,150.00	80.1 %	137,512,333,000.00	81.42 %	169,620,750,000.00	82.68 %	156,576,735,405.97	83.87 %	158,992,895,481.65	83.87 %	953,504,162,037.62	Bidang Bina Marga Dinas PUPR		
			31	Perencanaan Jalan	Terencanaanya Pembangunan Jalan	NA	12 Bln	3,658,410,000.00	12 Bln	7,101,526,000.00	12 Bln	2,830,000,000.00								36 Bln		13,589,936,000.00	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan yang dihasilkan	NA							25 Paket	1,426,000,000.00	25 Paket	1,426,000,000.00	25 Paket	1,426,000,000.00	75 Paket	4,278,000,000.00			
			32	Pembangunan Jalan	Tersedianya Pembangunan Jalan	NA	15 Km	147,493,141,000.00	15 Km	78,210,251,150.00	15 Km	86,081,108,000.00								45 Km		311,784,500,150.00	
					Panjang Jalan yang dibangun	45 Km							15 Km	138,509,468,000.00	15 Km	125,465,453,405.97	15 Km	127,881,613,481.65	90 Km	391,866,534,887.62			
			33	Perencanaan Jembatan	Terencanaanya Pembangunan Jembatan	NA	12 Bln	3,500,000,000.00	-	-	12 Bln	1,029,075,000.00										36 Bln	4,529,075,000.00
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jembatan yang dihasilkan	NA							15 Paket	343,000,000.00	15 Paket	343,000,000.00	15 Paket	343,000,000.00	45 Paket	1,029,000,000.00			
			34	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Pembangunan Jembatan	NA	15 Unit	47,500,000,000.00	15 Unit	36,738,120,000.00	15 Unit	42,411,000,000.00										45 Unit	126,649,120,000.00
					Jumlah Jembatan yang dibangun	45 Unit							15 Unit	24,530,000,000.00	15 Unit	24,530,000,000.00	15 Unit	24,530,000,000.00	90 Unit	73,590,000,000.00			
			35	Pengawasan Jalan	Terawasinya Pembangunan Jalan	NA	15 Paket	4,500,000,000.00	-	-	15 Paket	3,082,320,000.00										15 Paket	7,582,320,000.00
					Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jalan yang dilaksanakan	30 Paket							15 Paket	4,081,782,000.00	15 Paket	4,081,782,000.00	15 Paket	4,081,782,000.00	60 Paket	12,245,346,000.00			
			36	Pengawasan Jembatan	Terawasinya Pembangunan Jembatan	NA	15 Paket	2,100,000,000.00	-	-	15 Paket	2,078,830,000.00										30 Paket	4,178,830,000.00
					Jumlah Paket Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Jembatan yang dilaksanakan	30 Paket							15 Paket	730,500,000.00	15 Paket	730,500,000.00	15 Paket	730,500,000.00	60 Paket	2,191,500,000.00			
		8	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Luas Kawasan banjir yang tertangani drainase	176 Km	12 Km	4,371,645,000.00	12 Km	724,994,800.00	12 Km	6,832,653,000.00								11,929,292,800.00				
			Persepsi Jalan yang Memiliki Drainase/Saluran Pembuangan Air							0,09 %	6,454,473,500.00	0,09 %	5,958,124,500.00	0,09 %	6,049,879,700.00	0,09 %	18,462,477,700.00						
		37	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Tertindakanya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	8 Km	-	4,067,180,000.00	3.5 Km	724,994,800.00	7 Km	6,326,223,000.00								18.5 Km	11,118,397,800.00			
			Jumlah Culver Box yang dibangun	NA						25 Unit	6,117,473,500.00	25 Unit	5,621,124,500.00	25 Unit	5,712,879,700.00	75 Unit	17,451,477,700.00						
		38	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	NA	25 Paket	198,000,000.00	-	-	25 Paket	235,000,000.00								50 Paket	433,000,000.00			

				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong						25 Paket	135,000,000.00	25 Paket	135,000,000.00	25 Paket	135,000,000.00	125 Paket	405,000,000.00		
			Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	25 Paket	106,465,000.00	-	25 Paket	271,430,000.00							50 Paket	377,895,000.00		
				Jumlah Paket Pembangunan Box Culvert yang dilaksanakan						25 Paket	202,000,000.00	25 Paket	202,000,000.00	25 Paket	202,000,000.00	125 Paket	606,000,000.00		
			9 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase Jalan Lingkungan Kondisi Baik	19 %	23 %	24,477,074,000.00	27 %	559,082,280.00	32 %	507,264,280.00	-	-	-	-	32 %	25,543,420,560.00		Program Tidak dilanjutkan (Program Dinas Perumahan dan Permukiman)
			Pembangunan Jalan 40 dan Jembatan Pedesaan	Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan pedesaan	NA	15 Km	24,477,074,000.00	15 Km	559,082,280.00	15 Km	507,264,280.00	-	-	-	-	45 Km	25,543,420,560.00		
			10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	100 %	100 %	5,367,170,000.00	100 %	80,285,850.00	-	-	-	-	-	-	100 %	5,447,455,850.00		Program Tidak dilanjutkan (Program Dinas Perumahan dan Permukiman)
			41 Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah	Terlaksananya Percepatan Sanitasi Permukiman di Daerah	NA	15 Paket	5,367,170,000.00	15 Paket	80,285,850.00	-	-	-	-	-	15 Paket	5,447,455,850.00			
			11 Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Tahun Berkenaan	100 %	-	-	100 %	3,238,702,000.00	100 %	2,554,623,000.00	-	-	-	-	100 %	5,793,325,000.00		Program Tidak dilanjutkan
			12 Program Evaluasi dan Pengendalian dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan	Persentase Kegiatan bidang ke PU an yang dimonitoring dan evaluasi tahun berkenaan	100 %	-	-	100 %	195,491,000.00	100 %	154,200,000.00	-	-	-	-	100 %	349,691,000.00		Program Tidak dilanjutkan
			13 Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	NA	100 %	322,457,000.00	100 %	4,183,677,000.00	100 %	6,595,477,000.00	100 %	15,541,320,000.00	100 %	14,338,192,500.00	100 %	14,559,000,700.00	100 %	55,540,124,200.00
				Panjang rusus jalan (fungsional) yang diperbaiki menggunakan alat berat UPTD Peralatan dan Perbekalan	-	-	-	-	-	50 Km		50 Km			27.5 Km		127.5 Km		
			42 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	NA	100 %	322,457,000.00	100 %	4,183,677,000.00	100 %	300,000,000.00	100 %							4,806,134,000.00
				Jumlah Alat Berat yang dipelihara						10 unit	600,000,000.00	10 unit	600,000,000.00	10 unit	600,000,000.00	30 Unit	1,800,000,000.00		Bidang Bina Marga Dinas PUPR
			43 Operasional UPTD ALKAL Rantau Rasau	Terlaksananya operasional UPTD ALKAL Rantau Rasau							2,174,623,000.00								2,174,623,000.00
			44 Operasional UPTD ALKAL Sadu	Terlaksananya operasional UPTD ALKAL Rantau Sadu	NA						2,095,749,000.00								2,095,749,000.00
			45 Operasional UPTD ALKAL Geragai	Terlaksananya operasional UPTD ALKAL Rantau Geragai							2,025,105,000.00								2,025,105,000.00
			46 Operasional UPTD ALKAL	Panjang jalan yang diperbaiki dengan peralatan dan perbekalan						50 Km	14,941,320,000.00	50 Km	13,738,192,500.00	27.5 Km	13,959,000,700.00	127.5 Km	42,638,513,200.00		
Meningkatnya kualitas sumber daya air penunjang keadulatan pangan	Menciptakan Sistem Pengelolaan Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkelanjutan	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang teraliri oleh Jaringan Irigasi	14 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengaliran Lainnya	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	62.61 %	66.8 %	42,361,980,000.00	71 %	19,740,986,650.00	74.5 %	4,256,604,000.00	75.95 %	28,028,500,000.00	77.45 %	25,873,108,350.00	78.95 %	26,273,554,200.00	78.95 %	146,534,733,200.00
				Cakupan Luas Lahan Pertanian yang teraliri oleh Jaringan Irigasi	NA							36 %		38 %	40 %				-
			47 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Terpeliharanya jaringan irigasi	532.3 Km	129 Km	39,223,780,000.00	130 Km	17,392,676,650.00	135 Km	2,162,804,000.00					926.26 Km	58,779,260,650.00		Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR
				Panjang Saluran dan tanggul yang direhab	926.3 Km						59 Km	25,968,500,000.00	63 Km	23,813,108,350.00	66 Km	24,213,554,200.00	1114.3 Km	73,995,162,550.00	
			48 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	Teroptimisasinya fungsi jaringan irigasi yang telah di bangun	NA	75 Km	3,138,200,000.00	75 Km	2,348,310,000.00	75 Km	2,093,800,000.00					225 Km	7,580,310,000.00		
				Panjang Saluran yang dilaksanakan pemeliharaan	225 Km						75 Km	2,060,000,000.00	75 Km	2,060,000,000.00	75 Km	2,060,000,000.00	375 Km	6,180,000,000.00	

			15	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Cakupan Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	52,86 %	53 %	59,117,000.00	55 %	-	57 %	-	-	-	-	-	57 %	59,117,000.00			
			49	Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah	Tersedianya Sumur Air Tanah			59,117,000.00		-	-	-	-	-	-	-	-	59,117,000.00			
			16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah				9,919,437,000.00		62,042,150.00		-	-	-	-	-	-	9,981,479,150.00			
			50	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah				3,939,570,000.00		-		-	-	-	-	-	-	3,939,570,000.00			
			51	Operasional UTD Sistem Penyediaan Air Minum				5,979,867,000.00		62,042,150.00		-	-	-	-	-	-	6,041,909,150.00			
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota	Pelaksanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	17	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	NA	100 %	-	100 %	2,911,793,000.00	100 %	1,177,065,000.00					100 %	4,088,858,000.00			
					Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Tata Ruang yang tertangani	100 %					100 %	1,527,794,875.00	100 %	1,410,307,500.00	100 %	1,432,026,500.00	100 %	4,370,128,875.00			
			52	Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten	Tersusunnya Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten	NA		-	1 Dok	2,911,793,000.00		-		-			1 Dok	2,911,793,000.00			
			53	Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kab. Tanjung Jabung Timur	NA		-	1 Dok	242,200,000.00		-		-			1 Dok	242,200,000.00			
			54	Finalisasi dan Legislasi Rancangan Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersusunnya Finalisasi dan Legislasi Rancangan Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	NA		-	1 Dok	207,000,000.00		-		-			1 Dok	207,000,000.00			
			55	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perumahan (RP3KP)	Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perumahan (RP3KP)	NA		-	1 Dok	301,865,000.00		-		-			1 Dok	301,865,000.00			
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perumahan (RP3KP)	1 Dok					1 Dok	56,844,875.00					2 Dok				
			56	Penyusunan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	NA		-	1 Dok	208,700,000.00		-		-				208,700,000.00			
					Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang disusun	1 Dok					1 Dok	366,900,000.00	1 Dok	366,900,000.00	1 Dok	366,900,000.00	4 Dok				
			57	Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur	Tersedianya Jumlah Dokumen Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur	NA		-	1 Dok	217,300,000.00		-		-			1 Dok	217,300,000.00			
					Jumlah Dokumen Finalisasi Materi Teknis dan Draft Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur yang tersedia	1 Dok					2 Dok	372,400,000.00	2 Dok	372,400,000.00	2 Dok	372,400,000.00	7 Dok	1,117,200,000.00			
			58	Penyusunan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	Jumlah Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis	NA		-	1 Dok	530,850,000.00		-		-			1 Dok	530,850,000.00			
			59	Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Revisi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur	NA		-	1 Dok	200,800,000.00		-		-			1 Dok	200,800,000.00			

Program Task dilanjutkan (Program Dinas Perumahan dan Permukiman)

Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

			Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten yang disusun	NA	-	-	-	-	3 Dok	671,007,500.00	3 Dok	692,726,500.00	6 Dok	1,363,734,000.00					
			18 Program Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	149,324,250.00	100 %	137,841,300.00	100 %	139,964,000.00	1	427,129,550.00	Bidang Tata Ruang Dinas PUPR		
			Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan	NA	-	-	-	1 Kali	1 Kali	149,324,250.00	1 Kali	137,841,300.00	1 Kali	139,964,000.00	3 Kali	427,129,550.00			
			19 Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Tata Ruang	100 %	100 %	-	100 %	250,133,000.00	100 %	197,300,000.00	100 %	373,135,712.00	100 %	340,441,600.00	100 %	1,506,694,712.00			
			Sosialisasi Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	Terselenggaranya Sosialisasi Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur	NA	-	-	1 Keg	250,133,000.00	1 Keg	105,000,000.00				2 Keg	355,133,000.00				
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Tata Ruang Kab. Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan		2 Keg					1 Keg	100,000,000.00	1 Keg	340,441,600.00	1 Keg	345,684,400.00	5 Keg	786,126,000.00	Bidang Tata Ruang Dinas PUPR		
			Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang disusun	NA	-	-	-	1 Dok	1 Dok	92,300,000.00				1 Dok	92,300,000.00				
					1 Dok					1 Dok	273,135,712.00				2 Dok	273,135,712.00				
Meningkatnya kompetensi Penyedia Barang dan Jasa yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan Kompetensi Penyedia Barang dan Jasa sesuai profesi di sektor jasa konstruksi yang berdaya saing secara global	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	20 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	NA	-	-	80 %	354,850,000.00	80 %	279,900,000.00	85 %	320,394,750.00	90 %	295,756,400.00	100 %	300,311,000.00	100 %	1,551,212,150.00	
			Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi	Terselenggaranya Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi	NA	-	-	50 Org	80,000,000.00	50 Org	75,000,000.00						155,000,000.00			
			Jumlah peserta yang mengikuti Bintek CCO Jasa Teknis Dalam Pelaksanaan Konstruksi		100 Org					50 Org	75,000,000.00					150 Org	75,000,000.00			
			Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Managemen Mutu (SMM)	Terselenggaranya Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Managemen Mutu (SMM)	NA	-	-	1 Keg	85,000,000.00	1 Keg	65,000,000.00				2 Keg	150,000,000.00				
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Jasa Konstruksi Standar Managemen Mutu (SMM) yang dilaksanakan		2 Keg					1 Keg	65,000,000.00				3 Keg	65,000,000.00				
			Bintek dan Pelatihan Ke PU an	Terselenggaranya Bintek dan Pelatihan Ke PU an	NA	-	-	35 Org	105,000,000.00	35 Org	70,750,000.00				70 Org	175,750,000.00				
			Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek dan Pelatihan Ke PU an		70 Org					35 Org	111,244,750.00	35 Org	120,756,400.00	35 Org	125,311,000.00	175 Org	367,312,150.00			
			Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	NA	-	-	1 Keg	84,850,000.00	1 Keg	69,150,000.00				2 Keg	154,000,000.00				
			Jumlah Kegiatan Sosialisasi Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang dilaksanakan		2 Keg					1 Keg	69,150,000.00	1 Keg	80,000,000.00	1 Keg	80,000,000.00	5 Keg	229,150,000.00			
			Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	NA	-	-	-				1 Keg	95,000,000.00		95,000,000.00	1 Keg	190,000,000.00			
			21 Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Bidang Jasa Konstruksi yang disertifikasi	NA	100 %	-	100 %	1,610,958,000.00	100 %	1,270,691,000.00	-	-	-	-	100 %	2,881,649,000.00	Program tidak dilanjutkan digabung dengan program pemberdayaan jasa konstruksi		
			Persentase peningkatan Sistem Informasi	Jumlah Kecamatan yang di bina	NA	-	-	2 Kec	1,102,047,000.00	2 Kec	869,273,000.00				4 Kec	1,971,320,000.00				

		Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	NA						64 %	66,205,250.00	82 %	61,114,000.00	100 %	62,055,500.00	100 %	189,374,750.00	
	70	Bintek dan Pelatihan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Bintek dan Pelatihan Jalan dan Jembatan	NA	-	1 Keg	70,750,000.00	1 Keg	90,000,000.00		-		-		-	2 Keg	160,750,000.00	
	71	Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	NA	-	1 Keg	124,800,000.00	1 Keg	157,000,000.00		-		-		-	2 Keg	281,800,000.00	
	72	Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	Terlaksananya Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	NA	-	1 Keg	906,497,000.00	1 Keg	622,273,000.00							2 Keg	1,528,770,000.00	
			Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Tukang Terampil dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil	NA						30 Org	66,205,250.00	30 Org	61,114,000.00	30 Org	62,055,500.00	90 Org	189,374,750.00	
	73	Sosialisasi Administrasi Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Administrasi Perencanaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi		-		-		-								-	
	74	Bintek Perhitungan Pelaporan dan Scodule Kurva Kegiatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang mengikuti Bintek Perhitungan Pelaporan dan Scodule Kurva Kegiatan Jasa Konstruksi		-		-		-								-	
JUMLAH PAGU INDIKATIF BELANJA LANGSUNG 2016 - 2021						314,118,948,892.09	167,446,201,776.22	167,909,129,591.55	231,049,082,000.00		213,269,228,789.97		216,560,453,781.65		1,310,353,045,831.48			

Sidang
Jasa
Konstruksi
Dinas
PUPR

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan salah satu instrument dalam mengukur apa yang menjadi target-target pencapaian selama 5 tahun mendatang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dalam menyusun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini didasarkan pada aspek rasionalitas dan tingkat kewajaran sesuai standar yang berlaku.

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga didasarkan pada aspek tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun dengan berdasarkan pendekatan masukan, keluaran, hasil, dampak dan manfaat. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase terhubungnya desa/kelurahan ke ibu kota Kecamatan dengan kondisi mantap	30%	32.26%	40.86%	49.46%	61.29%	73.12%	84.94%	84.94%
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	28%	30%	32%	34%	36%	38%	40%	40%
3	Persentase Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Angkatan Kerja Bidang Konstruksi yang disertifikasi profesi	80%	-	80%	80%	85%	90%	100%	100%
5	Persentase peningkatan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi di Kecamatan	64%	-	-	-	64%	82%	100%	100%
6	Skor IKM	-	-	-	-	76	82	88	88
7	Nilai AKIP	-	-	-	-	65	68	70	70
8	Laporan Keuangan	-	-	-	-	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu komponen pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang memuat kebijakan pembangunan baik yang terkait dengan kebijakan APBD maupun yang diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan harapan perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Demikian penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, diharapkan dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

